

Analisis Perubahan Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pengaruhnya Terhadap Penunggakan Pajak Di Seksi Penagihan Pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi

 Oleh: Inggit Estuputri Handoyo (03620291)

Accounting

Dibuat: 2008-12-16 , dengan 3 file(s).

Keywords: Pokok perubahan undang-undang, pedoman pelaksanaan penagihan, kepatuhan wajib pajak, tunggakan pajak, realisasi tunggakan pajak.

ABSTRAK

Dari hasil penelitian di KPP Banyuwangi diketahui penelitian ini berjudul “Analisis Perubahan Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pengaruhnya Terhadap Penunggakan Pajak Di Seksi Penagihan Pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi” merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai apa yang kita teliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan antara Undang –Undang No. 19 tahun 1997 menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2000, untuk mengetahui apakah ada perubahan dari perubahan Undang-undang dan bagaimana keefektifitas dari perubahan Undang-undang.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya tingkat tunggakan pajak indonesia pada awal 2001 mencapai 13,3 Triliun. Tunggakan ini sebagai indikator rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Soemahamidjaja dalam Waluyo, dkk.(200:5) menyatakan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi di atas maka dapat kita tarik suatu benang merah yang menunjukkan bahwa tingginya tunggakan pajak.

Pemerintah mereformasi undang –undang perpajakan dan salah satunya Undang-undang No. 19 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yaitu dari Undang –Undang No. 19 tahun 1997 menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2000. Diharapkan dengan perubahan undang-undang dapat menekan Wajib Pajak untuk sadar membayar pajak.

Dari hasil penelitian di KPP Banyuwangi diketahui bahwa undang-undang No. 19 tahun 1997 dan undang-undang No.19 tahun 2000 adalah suatu pedoman dari pelaksanaan penagihan pajak jadi prosedur dalam penagihan pajak harus sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Undang-undang. Dari perubahan Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2000 diketahui bahwa pelaksanaan penagihan pajak dan mengukur kepatuhan wajib pajak serta efektifitas pada perubahan undang-undang, menunjukkan peningkatan yang lebih baik walaupun hasil analisis ke efektifitas masih kurang dari 100% yang menunjukkan bahwa tidak bisa dikatakan efektif.

Dalam melaksanakan penagihan pajak dimana juru sita melakukan prosedur sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang perpajakan No.19 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, diluar dari itu muncul kendala-kendala dari wajib pajak maupun jurusita itu sendiri.

ABSTRACT

From result of research in tax service office in KPP Banyuwangi know that these research has entitled "Analysis evolution of UU No.19 1997 to be UU No.19 2000 about collecting tax with amount of letter and effect from tax payer yet in the KPP Banyuwangi" this research represent descriptive research, that is a research conducted to know regarding how accurate it is. The purpose of this research know about evolution between UU No. 19 1997 to be UU No. 19 2000. This research background by high amount tax arrears in Indonesia in the 2001 reaching Rp 13,3 Trillion. These tax arrears as long indicator of level compliance of taxpayer. According to Soemahamidjaja in Waluyo,dkk (2003:5) which is expressing from that tax fee obliged to, in the form of goods or Money, collected by power pursuant to law norms, utilize to close goods production cost and collective service in reaching prosperity of public. From definition above so we can make a condition which indicate that tax arrears height.

Reformation of government UU taxing and UU No. 19 about collecting tax with amount of letter that is from UU UU No. 19 1997 to be UU No. 19 2000. Hopefully with evolution UU can less compliance of tax payer to know payer tax.

From result of research in KPP Banyuwangi know that UU No.19 1997 to be UU No.19 2000 is doing collecting tax being procedure from collecting tax must be following with rule in the UU. From evolution of UU No. 19 1997 to be UU No. 2000 know that collecting tax and compliance of tax payer and effectiveness in evolution of UU, Showing high prestation although result analysis effectiveness. Still less than 100% that is showing not effective.

In the collecting tax which juru sita following the procedure in the UU tax payer No. 19 about collecting tax with amount of letter, out of from that there is factor-factor from compliance of tax payer although jurusita self.